



**LAPORAN TIM  
PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**2022**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, terutama perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, data-data telah kami peroleh yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Semoga Bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 30 Desember 2022  
Ketua Harian,



**Hasriyani, SH., MM**  
Pembina TK. I, IV/b  
NIP. 19730717 200312 2 008



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 1          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 3          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 4          |
| <b>BAB II RENCANA AKSI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK<br/>DALAM NEGERI (P3DN) PROVINSI KALIMANTAN UTARA<br/>TAHUN 2022 .....</b>                     | <b>6</b>   |
| 2.1 Hasil Reviu Atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri (P3DN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi<br>Kalimantan Utara .....               | 6          |
| 2.2 Tugas dan Fungsi Tim Peningkatan Penggunaan Produk<br>Dalam Negeri (P3DN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi<br>Kalimantan Utara Tahun 2022..... | 10         |
| 2.2 Rencana Aksi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri (P3DN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan<br>Utara Tahun 2022 .....    | 17         |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>  | <b>70</b>  |
| 3.1 Kesimpulan .....  | 70         |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>71</b>  |



## DAFTAR TABEL

|           |                                 |    |
|-----------|---------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Realisasi PDN per OPD .....     | 7  |
| Tabel 2.2 | Rencana Aksi Tim P3DN 2022..... | 17 |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan produk UMKM pada kegiatan business matching pengadaan produk dalam negeri yang digelar pada 22-24 Maret 2022

Program P3DN merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Dengan demikian, barang/jasa yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang.

### 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);

8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;



P3DN –

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara

2. Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan
3. Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri sebagaimana tertuang dalam RIPIN Tahun 2015-2035.

Sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi:

1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat;
2. Peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
3. Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan
4. Peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

##### **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



P3DN –

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara

## **Bab II Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah.

## **Bab III Penutup**

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



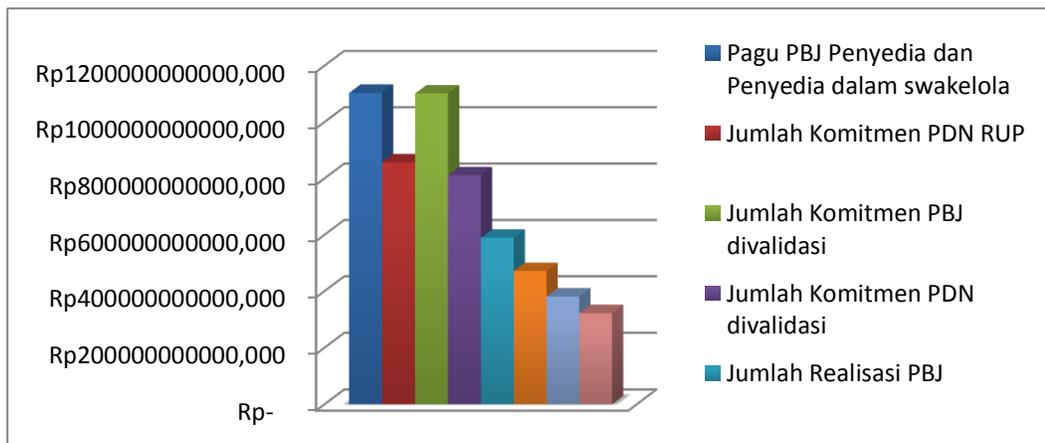
BAB II

RENCANA AKSI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

2.1 Hasil Reviu Atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pencapaian provinsi Kalimantan Utara terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) per 16 Desember 2022 senilai jumlah realisasi PDN senilai Rp. 471.276.153.140,64 (57,11%) dengan ringkasan sebagai berikut :

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| Pagu PBJ Penyedia dan Penyedia dalam swakelola | : Rp | 1.103.323.336.647,00 |
| Jumlah Komitmen PDN RUP                        | : Rp | 856.716.916.389,00   |
| Jumlah Komitmen PBJ divalidasi                 | : Rp | 1.101.130.112.000,05 |
| Jumlah Komitmen PDN divalidasi                 | : Rp | 810.992.073.241,75   |
| Jumlah Realisasi PBJ                           | : Rp | 589.468.756.380,50   |
| Jumlah Realiasi PDN                            | : Rp | 471.276.153.140,64   |
| Realisasi Komitmen PDN                         | : Rp | 380.999.947.032,00   |
| Realisasi Komitmen TKDN                        | : Rp | 321.905.198.153,39   |





Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara per tanggal 16 desember 2022 dengan Jumlah Realisasi P3DN senilai Rp. 471.276.153.140,64 (57,11%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi P3DN per OPD

| No | NAMA OPD   | Jumlah Komitmen P3DN RUP | Jumlah Komitmen P3DN divalidasi | Jumlah Realisasi P3DN | % Realisasi P3DN |
|----|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan                                  | 14.700.544.444,00        | 129.005.320.346,80              | 5.692.528.401,90      | 4,41             |
| 2  | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm | 29.717.196.907,00        | 22.330.996.907,00               | 12.763.704.086,10     | 57,16            |
| 3  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                | 825.674.259,00           | 758.918.587,50                  | 363.148.519,00        | 47,85            |
| 4  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang | 7.115.776.284,00         | 7.115.776.284,00                | 821.899.301,00        | 11,55            |
| 5  | Inspektorat                                      | 5.445.181.164,00         | 3.453.913.247,74                | 2.607.209.896,04      | 75,49            |
| 6  | Dinas Kelautan Dan Perikanan                     | 8.986.398.619,00         | 7.090.092.633,98                | 3.969.431.109,00      | 55,99            |
| 7  | Sekretariat Dprd                                 | 26.944.331.033,00        | 26.681.941.522,01               | 15.655.498.270,00     | 58,67            |
| 8  | Satuan Polisi Pamong Praja                       | 1.313.094.899,00         | 1.330.255.559,00                | 920.903.978,00        | 69,23            |
| 9  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 1.132.483.788,00         | 1.152.688.648,68                | 808.273.667,00        | 70,12            |
| 10 | Rsud Dr. H. Jusuf Sk                             | 9.037.382.000,00         | 6.797.382.000,00                | 4.238.486.100,00      | 62,35            |
| 11 | Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan     | 1.383.018.763,00         | 799.510.044,40                  | 524.847.835,50        | 65,65            |
| 12 | Biro Administrasi Pembangunan                    | 482.922.355,00           | 325.476.958,00                  | 30.824.860,00         | 9,47             |
| 13 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan                    | 2.123.158.652,00         | 1.090.270.962,00                | 226.562.351,00        | 20,78            |



| No | NAMA OPD  | Jumlah Komitmen PDN RUP | Jumlah Komitmen PDN divalidasi | Jumlah Realisasi PDN | % Realisasi PDN |
|----|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
|    | Pangan  |                         |                                |                      |                 |
| 14 | Biro Perekonomian   | 421.486.407,00          | 329.159.871,50                 | 2.200.000,00         | 0,67            |
| 15 | Badan Kepegawaian Daerah  | 1.382.055.164,00        | 1.257.045.142,00               | 373.799.180,00       | 29,74           |
| 16 | Dinas Kehutanan   | 40.903.779.641,00       | 20.968.166.456,60              | 4.873.620.146,10     | 23,24           |
| 17 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                              | 2.328.112.264,00        | 2.242.857.064,00               | 1.313.988.657,00     | 58,59           |
| 18 | Biro Hukum  | 851.872.873,00          | 157.402.694,00                 | 120.263.421,00       | 76,40           |
| 19 | Biro Organisasi   | 766.540.806,00          | 766.540.806,00                 | 552.288.485,00       | 72,05           |
| 20 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah                                | 246.366.535,00          | 246.366.535,00                 | 173.099.584,00       | 70,26           |
| 21 | Biro Umum   | 41.332.728.426,00       | 18.412.789.819,93              | 15.302.630.594,00    | 83,11           |
| 22 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah                                      | 13.396.273.811,00       | 11.760.305.705,00              | 8.318.813.286,00     | 70,74           |
| 23 | Badan Penghubung  | 6.195.909.109,00        | 4.761.083.371,00               | 4.761.083.371,00     | 100,00          |
| 24 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 116.066.254.371,00      | 73.866.154.586,80              | 6.062.864.368,00     | 8,21            |
| 25 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | 471.998.894.204,00      | 423.938.295.913,00             | 358.092.810.923,00   | 84,47           |
| 26 | Dinas Sosial  | 4.106.304.792,00        | 3.003.911.936,40               | 1.579.367.374,00     | 52,58           |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup  | 9.786.389.093,00        | 4.674.338.593,00               | 10.968.056,00        | 0,23            |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah   | 7.469.632.795,00        | 6.110.160.191,60               | 1.563.271.465,00     | 25,58           |



| No | NAMA OPD  | Jumlah Komitmen PDN RUP | Jumlah Komitmen PDN divalidasi | Jumlah Realisasi PDN | % Realisasi PDN |
|----|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 29 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                     | 350.499.496,00          | 276.600.510,50                 | 117.357.241,00       | 42,43           |
| 30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                      | 549.874.704,00          | 464.222.886,00                 | 265.939.553,00       | 57,29           |
| 31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Kb | 952.984.635,00          | 876.395.109,25                 | 250.534.830,00       | 28,59           |
| 32 | Dinas Perhubungan   | 5.826.594.813,00        | 4.361.208.415,00               | 1.793.248.852,00     | 41,12           |
| 33 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian                       | 14.160.522.910,00       | 16.099.273.910,00              | 10.553.139.208,00    | 65,55           |
| 34 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                      | 931.844.025,00          | 928.944.025,00                 | 504.029.022,00       | 54,26           |
| 35 | Dinas Pemuda Dan Olahraga   | 2.315.552.981,00        | 2.315.552.981,00               | 1.840.049.381,00     | 79,46           |
| 36 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | 1.877.960.390,00        | 731.943.503,25                 | 463.887.634,00       | 63,38           |
| 37 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi   | 651.677.275,00          | 651.677.275,00                 | 406.688.892,00       | 62,41           |
| 38 | Dinas Pariwisata  | 4.582.819.998,00        | 4.300.699.534,01               | 402.216.692,00       | 9,35            |
| 39 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah   | 405.342.333,00          | 385.252.668,80                 | 141.019.084,00       | 36,60           |



| No           | NAMA OPD                             | Jumlah Komitmen PDN RUP   | Jumlah Komitmen PDN divalidasi | Jumlah Realisasi PDN      | % Realisasi PDN |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 40           | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa       | 1.492.201.162,00          | 1.003.087.461,00               | 586.571.760,00            | 58,48           |
| 41           | Biro Administrasi Pimpinan           | 2.217.410.605,00          | 2.001.145.185,00               | 1.714.705.297,00          | 85,69           |
| 42           | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral | 941.867.604,00            | 928.947.391,00                 | 512.378.410,00            | 55,16           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>856.716.916.389,00</b> | <b>815.752.073.241,75</b>      | <b>471.276.153.140,64</b> | <b>57,77</b>    |

## 2.2 Tugas dan Fungsi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah** untuk mengoordinasikan terkait penyempurnaan peraturan daerah dibidang perekonomian dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintahan.
- 2. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah** untuk mengoordinasikan percepatan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.



**3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk :**

- a. Meningkatkan jumlah produk untuk mendukung target nasional dalam Katalog Elektronik terutama menuju 1.000.000 produk dalam negeri;
- b. Memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing serta e-Kontrak untuk di ekstrak lebih awal sebagai mekanisme Early Warning System/pemantauan;
- c. Memperbanyak pencatuman produk dalam negeri Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada e-katalog lokal dan toko darin;
- d. Mempercepat proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik; dan
- e. Melakukan percepatan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

**4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk:**

- a. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- b. Memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN produk dalam negeri yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai TKDN dan implementasi



- konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa;
- d. Menyusun kebijakan dan regulasi sebagai upaya mendorong produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok global;
  - e. Memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; dan
  - g. Melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan.

#### **5. Inspektorat untuk :**

- a. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim P3DN pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Mengawasi implemtasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;



- d. Melakukan pengawasan terhadap program P3DN dan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa paling sedikit 50% nilai anggaran belanja barang/jasa ntuk menggunakan produk UMKM; dan
- e. Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan.

**6. Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk :**

- a. Melakukan pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Melakukan percepatan sistem pembayaran Procure To Pay (P2P) pada pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk e-purchasing terutama untuk usaha kecil atau barang produk dalam negeri dan/atau produk UKM.

**7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** untuk memfasilitasi dalam pemantauan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh satuan pendidikan terutama oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi produk UMKM.



**8. Dinas Kesehatan untuk :**

- a. Mempercepat proses penerbitan perizinan pada produk dalam negeri dan produk UKM; dan
- b. Mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan).

**9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan untuk :**

- a. Melakukan pemetaan dan analisis terkait indikator untuk mendukung perencanaan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dan UKM;
- b. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas sektor organisasi perangkat daerah untuk mendukung percepatan peningkatan produk UMKM; dan
- c. Memasukkan indikator peningkatan produk dalam negeri dan produk UKM pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dan menjadikan indikator kinerja kunci pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

**10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk :**

- a. Melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan



- b. Memperkuat infrastuktur telekomunikasi agar seluruh sistem terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMKM melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI).

**11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk :**

- a. Mendorong percepatan investasi di Provinsi Kalimantan Utara pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan produk dalam negeri berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah; dan
- c. Mempercepat pengembangan Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) yang dapat mengklasifikasikan Pelaku Usaha dan mengintegrasikan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).



- 12. Dinas Perhubungan** untuk menjadikan simpul transportasi seperti di pelabuhan dan bandara, sebagai tempat promosi produk-produk UMKM lokal, mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal dalam proyek infrastruktur transportasi yang lokasinya tersebar di Provinsi Kalimantan Utara.
- 13. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman** untuk melakukan inventarisasi data baik rencana maupun realisasi belanja produk dalam negeri Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi (UMKK) dan produk impor (konstruksi dan non-konstruksi) pada seluruh paket pekerjaan TA 2022 dari belanja barang dan belanja modal.
- 14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** untuk memfasilitasi dalam pemantauan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh kelompok tani di Provinsi Kalimantan Utara.
- 15. Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Utara** untuk mendorong pelaku usaha yang tergabung pada Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- 16. Sekretariat untuk :**
- Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim P3DN pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
  - Menghimpun data dan informasi mengenai produk dalam negeri serta menyusun laporan P3DN Provinsi Kalimantan Utara.



### 2.3 Rencana Aksi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Setiap Perangkat Daerah yang menjadi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 memiliki rencana aksi. Untuk Realisasi pelaksanaan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Aksi Tim P3DN 2022

#### DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

| No | Program/Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Keterangan   | Dokumentasi   |
|----|--|--|--|---|
| 1  | <b>Program Pengembangan UMKM</b>   | melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait Bela Pengadaan dan e-catalog serta memberikan fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas PDN dan/atau produk UMK/Koperasi | Sebanyak 19 Pelatihan dan Sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait Bela Pengadaan dan e-catalog serta memberikan fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas PDN dan/atau produk UMK/Koperasi, sebagai berikut : |  |
|    | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah |  |  |   |
|    | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi      |  | Literasi Keuangan Bagi Usaha Mikro Angkatan I  |   |



|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>Pelatihan Standarisasi Produk Pangan dan Strategi Digital Marketing Angkatan ke I (Kewirausahaan Bagi Pelaku Penjamah Makanan)</p> |    |
|  |  |  | <p>Desain Kemasan Produk Angkatan I</p>   |    |
|  |  |  | <p>Pelatihan Standarisasi Produk Pangan Angkatan ke II (Kewirausahaan Bagi Pelaku Penjamah Makanan)</p>                               |   |
|  |  |  | <p>Pelatihan Digitalisasi Koperasi Untuk Pengurus Koperasi</p>  |  |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>Pelatihan Literasi Keuangan Bagi Usaha Mikro Dan Digital Marketing Angkatan II</p>                       |   |
|  |  |  | <p>Pelatihan Standarisasi Produk Pangan Angkatan III (Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Penjamah Makanan)</p> |   |
|  |  |  | <p>Pelatihan Layanan Bantuan Hukum Bagi Pelaku UKM</p>  |   |
|  |  |  | <p>Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Komunikasi Bisnis</p>  |  |



P3DN

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi   |   |
|  |  | Pelatihan Menyusun Strategi Pemasaran Produk   |   |
|  |  | Pelatihan Pengembangan Desain Produk Bagi Pelaku UMKM  |   |
|  |  | Pelatihan Literasi Keuangan Bagi Usaha Mikro Angkatan III dan Optimalisasi Marketplace Untuk Memasarkan Produk |  |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi Angkatan II      |    |
|  |  | Pelatihan Layanan Bantuan Hukum Bagi Pelaku UKM Angkatan III      |    |
|  |  | Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Baku Produk Lokal Angkatan I |   |
|  |  | Pelatihan Layanan Bantuan Hukum Bagi Pelaku UKM Angkatan IV       |  |



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Baku Produk Lokal Angkatan II                    |    |
|   |   |   | Pelatihan Digitalisasi Koperasi Untuk Pengurus Koperasi Angkatan II                   |    |
| 2 | <b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>   | Melakukan koordinasi melalui rapat Tim P3DN | Rapat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tanggal 27 Mei 2022       |   |
|   | <b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b> |   | Rapat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tanggal 16 September 2022 |  |



|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | <p>Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p> |  | <p>Rapat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tanggal 08 Desember 2022</p> |  |
|--|--|--|---|---|



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

| No | Program/Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Keterangan  | Dokumentasi |
|----|--|--|---|-------------|
| 1  | <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik /</b><br><i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i> | Mewajibkan media Online/Cetak/Stasiun Radio yang mempunyai Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltara Khususnya terkait Layanan Publikasi untuk menyediakan Space Khusus Iklan Layanan Masyarakat tentang Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia | - Terkait Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada prinsipnya Tahun 2022 tersedia Fasilitas Pendokumentasian dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan ruang lingkup kegiatan Pimpinan, kegiatan - kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kalimantan Utara, termasuk fasilitas komunikasi publik kebijakan / prioritas pembangunan pusat maupun daerah dengan mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan melalui platform yang dikelola oleh DKISP maupun melalui Kerjasama dengan beberapa jenis |             |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>Media.<br/>- Terkait dengan Rencana Aksi Penyediaan Space Khusus Iklan Layanan Masyarakat tentang Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia direncanakan akan dilaksanakan Tahun 2023.</p> |  |
|--|--|--|---|--|



|  |   |   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|--|---|---|--|---|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|----------|--|--|-------|-------------|--|--|---|--|--|-------------------|
| 2  | <p><b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika /</b><br/> <i>- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Bandwith 300Mbps untuk mengakomodir Jaringan Internet pada Gedung Gabungan Dinas, Gedung Kantor Gubernur, Gedung PUPR-PERKIM Gedung Dinas Perpustakaan Provinsi pada Tahun 2022.</li> <li>- Rencana Peningkatan Kapasitas Bandwith menjadi 1 Gbps dan melakukan instalasi jaringan serta penarikan kabel fiber optik (FO) ke kantor Gubernur yang baru serta integrasi internet ke Gedung Kantor yang belum terhubung pada Tahun 2023.</li> </ul> | <p>Penyediaan Bandwidth Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diupayakan ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka menunjang proses pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Untuk Tahun 2022 Kapasitas Bandwidth yang tersedia 300 Mbps dan Tahun 2023 diupayakan menjadi 1 Gbps.</p> |  <table border="1" data-bbox="1675 609 2005 885"> <tr> <td>5.1.02.02</td> <td>Belanja Jasa</td> <td>Rp. 4.200.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01</td> <td>Belanja Jasa Kantor</td> <td>Rp. 4.200.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0003</td> <td>Belanja Koneksi/Internet/TV Berlangganan</td> <td>Rp. 4.200.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">01) Belanja Jasa Sewa Bandwidth</td> <td>Rp. 4.200.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sumber Dana - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">(-)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sewa Bandwidth/Fiber Optik 1Gbps (dedicated)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spesifikasi: Fiber Optik 1 Gbps</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>12 Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bulan</td> <td>350.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp. 4.200.000.000</td> </tr> </table> | 5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 4.200.000.000 | 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 4.200.000.000 | 5.1.02.02.01.0003 | Belanja Koneksi/Internet/TV Berlangganan | Rp. 4.200.000.000 | 01) Belanja Jasa Sewa Bandwidth |  | Rp. 4.200.000.000 | Sumber Dana - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  | (-) |  |  |  | Sewa Bandwidth/Fiber Optik 1Gbps (dedicated) |  |  | Spesifikasi: Fiber Optik 1 Gbps |  |  | 12 Bulan |  |  | Bulan | 350.000.000 |  |  | 0 |  |  | Rp. 4.200.000.000 |
| 5.1.02.02                                  | Belanja Jasa  | Rp. 4.200.000.000   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
| 5.1.02.02.01                               | Belanja Jasa Kantor   | Rp. 4.200.000.000   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
| 5.1.02.02.01.0003                          | Belanja Koneksi/Internet/TV Berlangganan  | Rp. 4.200.000.000   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
| 01) Belanja Jasa Sewa Bandwidth            |   | Rp. 4.200.000.000   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
| Sumber Dana - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
| (-)  |   |   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|  | Sewa Bandwidth/Fiber Optik 1Gbps (dedicated)  |   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|  | Spesifikasi: Fiber Optik 1 Gbps   |   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|  | 12 Bulan  |   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|  | Bulan   | 350.000.000   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|  |   | 0   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |
|  |   | Rp. 4.200.000.000   |  |   |           |              |                   |              |                     |                   |                   |  |                   |                                 |  |                   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |          |  |  |       |             |  |  |   |  |  |                   |



|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 3 | <b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral I- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral- Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur</b> | - Konsolidasi Data PDN dan Produk UMKM- Pengembangan Dashboard Command Center | Telah dilaksanakan Kegiatan pengintegrasian awal dengan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memenuhi kebutuhan Pimpinan Daerah dalam monitoring, evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam kaitannya Pelaporan Realisasi P3DN melalui Pengembangan Aplikasi Dashboard Command Center |  |
|---|---|---|--|--|



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

| No | Program/Sub Kegiatan                                 | Rencana Aksi   | Keterangan  | Dokumentasi   |
|----|--|--|---|---|
| 1  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan pendukung pertanian | Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Hand sprayer) | <br> |



|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengelolaan penerbitan sertifikat benih | Belanja bahan-bahan/bibit tanaman (Padi unggul) | <p>Pengelolaan penerbitan sertifikat benih</p>  <p>Kecamatan Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Indonesia<br/>Jl. Langat No.14, Tj. Selor Hilli, Kec. Tj. Selor, Kabupaten Buhungan, Kalimantan Utara 77214, Indonesia<br/>Lat 2.847052°<br/>Long 117.386793°<br/>23/11/22 09:39 AM GMT +08:00</p>  |
|---|--|---|---|--|



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

| No | Program/Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Keterangan   | Dokumentasi |
|----|--|--|--|-------------|
| 1  | Program Promosi Penanaman Modal/<br>Sub Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Penyediaan Video Promosi Penanaman Modal yang berisi informasi tentang Potensi dan Peluang Investasi Kaltara | Penyediaan Video Promosi Penanaman Modal ini berisi tentang informasi Potensi dan Peluang Investasi Kalimantan Utara khususnya yang terkait dengan Kawasan Industri Hijau Indonesia , Tanah Kuning Mangkupadi Kabupaten Bulungan, Sektor Perikanan Rumput Laut Kabupaten Nunukan, sektor sektor lainnya seperti Pariwisata di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau serta Sektor Jasa di Kota Tarakan. Penyediaan Video promosi Penanaman modal ini dalam rangka mendorong percepatan investasi di Provinsi Kalimantan Utara khususnya pada produk |             |



|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   | produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara   |  |
| 2 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pembuatan video promosi digital yang salah satunya sektor perikanan | <ul style="list-style-type: none"><li>- Target Inspeksi Lapangan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 13 Pelaku Usaha</li><li>- Kegiatan inspeksi lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 49 pelaku usaha</li><li>- dengan kegiatan Inspeksi Lapangan diharapkan para pelaku usaha dapat menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu disetiap triwulans maupun semester</li><li>- Kegiatan sosialisasi maupun inspeksi lapangan diharapkan dapat membantu tercapainya target realisasi investasi baik target BKPM maupun target RPJMD</li></ul> |    |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 3 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal / - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Penyediaan Naskah Akademik dan Draft Raperda Penanaman Modal | Penyediaan Naskah Akademik dan Raperda Penanaman Modal ini sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan Penetapan dalam pemberian fasilitas insentif di bidang penanaman modal. Di Tahun 2023 akan dilakukan pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang Penanaman Modal bersama anggota legislatif dan OPD terkait, untuk dilakukan penetapan sebagai Peraturan Daerah yang nantinya menjadi acuan dalam penetapan Peraturan Daerah terkait Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan di bidang |  |
|---|---|--|--|--|



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>penanam modal yang nantinya dijadikan acuan dalam pemberian insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan produk dalam negeri berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah.</p> |  |
|--|--|--|--|--|



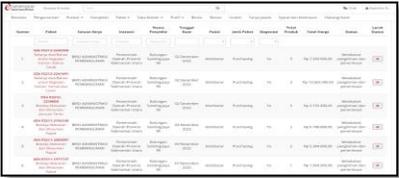
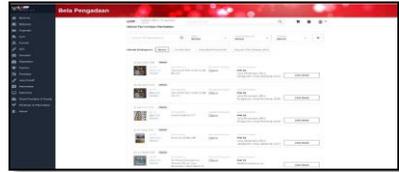
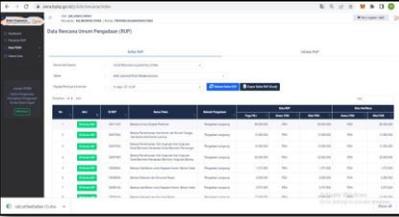
|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mensosialisasikan dan melakukan pendampingan OSS RBA ke pelaku usaha khusus untuk sub menu pelaporan LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal)</li><li>- Mensosialisasikan dan melakukan pendampingan saat mengkases OSS RBA ke pelaku usaha terkait pembuatan NIB baru serta bisa mengakses seluruh menu yang terdapat pada website OSS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan sosialisasi yang diadakan untuk mempermudah pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum dalam proses pembuatan perizinan</li><li>- memberikann informasi-informasi tambahan agar setelah pelaku usaha yang telah memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) di setian Triwulan ataupun Semester pada tahun berjalan</li><li>- Target Pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi baik implementasi pengawasan perizinan berbasis resiko maupun implementasi perizinan berusaha berbasis risiko sebanyak 284 pelaku usaha.</li><li>- Terkait dengan kegiatan</li></ul> |  |
|---|---|---|---|--|



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berbasis risiko serta kegiatan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan pada Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan serta Kabupaten Bulungan. untuk kabupaten yang tidak diadakan kegiatan sosialisasi dikarenakan pengalaman pada tahun sebelumnya saat pelaksanaan kegiatan pelaku usaha yang hadir sangat sedikit, sehingga untuk pelaku usaha di kabupaten Malinau serta Kabupaten Tana Tidung bisa mengikuti kegiatan via zoommetting</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam 5 kegiatan sosialisasi yang di adakan sebanyak 310 pelaku usaha</li></ul> |  |
|--|--|--|--|--|

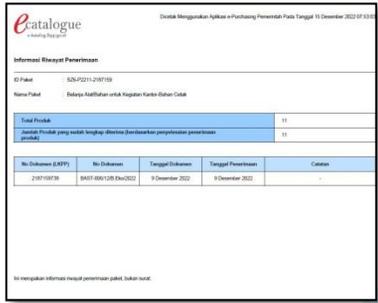


BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH)

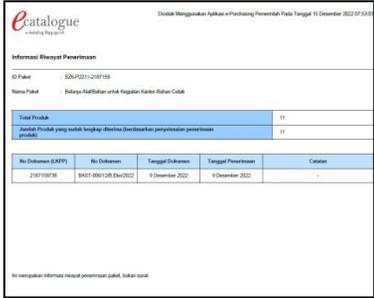
| No | Program/Sub Kegiatan                                | Rencana Aksi                                 | Keterangan   | Dokumentasi   |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Pengadaan Melalui Katalog lokal dan langsung | Telah melaksanakan pengadaan melalui ecatalog dan bela pengadaan | <br>    |
| 2  | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan          | Pengadaan Melalui Katalog lokal dan langsung | Telah melaksanakan pengadaan melalui ecatalog dan bela pengadaan | <br> |



BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

| No | Program/Sub Kegiatan                                  | Rencana Aksi  | Keterangan   | Dokumentasi  |
|----|---|---|--|--|
| A  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |   |  |  |
| 1  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |   |  |  |
| 1  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                      | Pengadaan ATK sudah menggunakan Ekatalog dan Bela Pengadaan. Pengadaan Makan Minum akan beralih menggunakan E Katalog setelah mengkomunikasikan kembali dengan PPTK dan Bidang. | Sudah dikomunikasikan dengan PPTK Pengampu dan Pengadaan ATK di Biro sudah Melalui E-Katalog |   |
| 2  | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan              | Pengadaan Map Biro Sudah Menggunakan E Katalog.   | Pengadaan Map Biro sudah Melalui E-Katalog   |  |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 2 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Termasuk pengadaan dikecualikan dan sudah menggunakan produk dalam negeri. | Sudah Menggunakan Produk Dalam Negeri. |   |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Termasuk pengadaan dikecualikan dan sudah menggunakan produk dalam negeri. | Sudah Menggunakan Produk Dalam Negeri. |  |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Kegiatan  | Sudah Menggunakan Produk Dalam Negeri.   |    |
| 3 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |  |   |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Termasuk pengadaan dikecualikan dan sudah menggunakan produk dalam negeri.   | Sudah Menggunakan Produk Dalam Negeri dan PPTK serta Pengurus Barang Sudah disosialisasikan untuk Memprioritaskan Produk Dalam Negeri. |   |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Belum dapat mengaplikasikan penggunaan E Katalog Karena penyedia belum ada. Sudah menggunakan Produk Dalam Negeri. | Sudah Menggunakan Produk Dalam Negeri dan PPTK serta Pengurus Barang Sudah disosialisasikan untuk Memprioritaskan Produk Dalam Negeri. |  |



|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| <b>B</b> | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                  |  |  |  |
| <b>1</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>     |  |  |  |
| 1        | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro               | Mengkomunikasikan kepada PPTK agar memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya. | Sudah Mensosialisasikan Kepada PPTK agar dalam pelaksanaan Kegiatan memperhatikan Penggunaan Produk dalam Negeri dan tentang TKDN. |   |
| 2        | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro               | Mengkomunikasikan kepada PPTK agar memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya. | Sudah Mensosialisasikan Kepada PPTK agar dalam pelaksanaan Kegiatan memperhatikan Penggunaan Produk dalam Negeri dan tentang TKDN. |  |
| <b>2</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b> |  |  |  |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Mengkomunikasikan kepada PPTK agar memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya. | Sudah Mensosialisasikan Kepada PPTK agar dalam pelaksanaan Kegiatan memperhatikan Penggunaan Produk dalam Negeri dan tentang TKDN. |  |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                    | Mengkomunikasikan kepada PPTK agar memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya. | Sudah Mensosialisasikan Kepada PPTK agar dalam pelaksanaan Kegiatan memperhatikan Penggunaan Produk dalam Negeri dan tentang TKDN. |  |



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

| No | Program/Sub Kegiatan                        | Rencana Aksi   | Keterangan | Dokumentasi  |
|----|---|--|------------|--|
| 1  | <b>PENGELOLAAN STRATEGI BARANG DAN JASA</b> | Sosialisasi program peningkatan P3DN serta bimtek perhitungan TKDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah |            |  |



DINAS KESEHATAN

| No   | Program/Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Keterangan   | Dokumentasi  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
|--|--|---|--|--|--|---|--------------------|------------|--|--|----|--------|---------------|-----------|-----------|--------|----|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----|----------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------|----|----------|-----------------|---|--------------------|------------|----|----------|-----------------|--|-------------------|-----------|----|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------|----|----------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|----|----------|-----------------|--|-------------------|------------|----|----------|-----------------|--|-------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1  | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan dan memerintahkan semua kegiatan pengadaan Produk dalam negeri tersebut harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.</li> <li>Melaksanakan rapat dan koordinasi kepada semua PPKOM di lingkungan dinas kesehatan didalam mengadakan pengadaan barang/jasa dalam pembelian obat atau alat kesehatan, untuk mengutamakan UKM di daerah Provinsi Kalimantan Utara.</li> </ul> |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DAFTAR REALISASI MONITORING P3DN TAHUN ANGGARAN 2022</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Nama/Instansi</th> <th>Nilai RUP</th> <th>Nilai RUP</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Obat-Program Kesehatan Ibu</td> <td>22.144.252,00 PPN</td> <td>551.945,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Obat-Program Kesehatan Anak</td> <td>28.897.852,00 PPN</td> <td>862.212,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/PROTEKTIF/OPERASAL</td> <td>257.000.000,00 PPN</td> <td>500.200,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN</td> <td>22.600.000,00 PPN</td> <td>54.200,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Personal Computer</td> <td>80.000.000,00 PPN</td> <td>597.800,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Mesin</td> <td>70.700.800,00 PPN</td> <td>400.200,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN</td> <td>22.400.000,00 PPN</td> <td>777.200,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN</td> <td>22.400.000,00 PPN</td> <td>509.800,00</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Barang-Baru/Barang</td> <td>600.000.000,00 PPN</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>01000000</td> <td>DINAS KESEHATAN</td> <td>Bahaya Model/Barang</td> <td>238.000.000,00 PPN</td> <td>506.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | DAFTAR REALISASI MONITORING P3DN TAHUN ANGGARAN 2022 |   |                    |            |  |  | No | Uraian | Nama/Instansi | Nilai RUP | Nilai RUP | Status | 01 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Obat-Program Kesehatan Ibu | 22.144.252,00 PPN | 551.945,00 | 02 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Obat-Program Kesehatan Anak | 28.897.852,00 PPN | 862.212,00 | 03 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/PROTEKTIF/OPERASAL | 257.000.000,00 PPN | 500.200,00 | 04 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN | 22.600.000,00 PPN | 54.200,00 | 05 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Personal Computer | 80.000.000,00 PPN | 597.800,00 | 06 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Mesin | 70.700.800,00 PPN | 400.200,00 | 07 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN | 22.400.000,00 PPN | 777.200,00 | 08 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN | 22.400.000,00 PPN | 509.800,00 | 09 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Barang-Baru/Barang | 600.000.000,00 PPN | 0,00 | 10 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 11 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 12 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 13 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 14 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 15 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 16 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 17 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 18 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 19 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 | 20 | 01000000 | DINAS KESEHATAN | Bahaya Model/Barang | 238.000.000,00 PPN | 506.400,00 |
| DAFTAR REALISASI MONITORING P3DN TAHUN ANGGARAN 2022 |  |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| No   | Uraian   |   |  |  | Nama/Instansi  | Nilai RUP   | Nilai RUP          | Status     |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 01   | 01000000   |   |  |  | DINAS KESEHATAN                                      | Bahaya Obat-Program Kesehatan Ibu                                 | 22.144.252,00 PPN  | 551.945,00 |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 02   | 01000000   |   |  |  | DINAS KESEHATAN                                      | Bahaya Obat-Program Kesehatan Anak                                | 28.897.852,00 PPN  | 862.212,00 |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 03   | 01000000   |   |  |  | DINAS KESEHATAN                                      | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/PROTEKTIF/OPERASAL | 257.000.000,00 PPN | 500.200,00 |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 04   | 01000000   |   |  |  | DINAS KESEHATAN                                      | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN          | 22.600.000,00 PPN  | 54.200,00  |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 05   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Personal Computer                           | 80.000.000,00 PPN  | 597.800,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 06   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Mesin                                       | 70.700.800,00 PPN  | 400.200,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 07   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN | 22.400.000,00 PPN  | 777.200,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 08   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | SELAKU-SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/INSTRUMEN | 22.400.000,00 PPN  | 509.800,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 09   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Barang-Baru/Barang                                | 600.000.000,00 PPN   | 0,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 10   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 11   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 12   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 13   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 14   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 15   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 16   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 17   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 18   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 19   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 20   | 01000000   | DINAS KESEHATAN   | Bahaya Model/Barang                                      | 238.000.000,00 PPN   | 506.400,00   |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 2  | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll) |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 3  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana                              |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 4  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 5  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif   |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 6  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut  |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |
| 7  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |   |  |  |  |   |                    |            |  |  |    |        |               |           |           |        |    |          |                 |                                   |                   |            |    |          |                 |                                    |                   |            |    |          |                 |   |                    |            |    |          |                 |  |                   |           |    |          |                 |                                |                   |            |    |          |                 |                    |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |  |                   |            |    |          |                 |                           |                    |      |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |    |          |                 |                     |                    |            |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 8  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                 |  |  |  |
| 9  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |  |  |  |
| 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                 |  |  |  |
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)         |  |  |  |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                       |  |  |  |
| 13 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional |  |  |  |



INSPEKTORAT

| No | Program/Sub Kegiatan                 | Rencana Aksi   | Keterangan  | Dokumentasi  |
|----|--------------------------------------|--|---|--|
| 1  | Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan  | Melaksanakan Monitoring Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui aplikasi SISWAS (Siera) BPKP setiap Jumat                                | Telah dilaksanakan setiap jumat                         |   |
|    | penyelenggaraan Pengawasan Internal  | Melaksanakan monitoring implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II Tahun 2022 | Telah dilaksanakan pada tanggal 27 juni s/d 8 juli 2022 |   |
|    | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Melaksanakan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Triwulan III Tahun 2022                  | Telah dilaksanakan pada tanggal 2-15 September 2022     |  |



P3DN -

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara -

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | <p>Melaksanakan Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan IV Tahun 2022</p> | <p>Akan dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Desember 2022</p> |  |
|--|--|---|---|---|



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

| No | Program/Sub Kegiatan  | Rencana Aksi   | Keterangan | Dokumentasi  |
|----|---|--|------------|--|
| 1  | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | <p>- Pelaksanaan belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam rangka Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang</p> <p>- Pengadaan belanja barang, jasa dan belanja modal yang dilaksanakan melibatkan UMKM daerah dan nasional dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia</p> |            | <b>Belanja Pakaian Batik Tradisional</b>   |
|    | <i>Sub Kegiatan<br/>Penyusunan Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>   |  |            |   |
|    | <i>Sub Kegiatan Koordinasi<br/>dan Penyusunan Laporan<br/>Capaian Kinerja dan<br/>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br/>SKPD</i> |  |            |  |
|    | <i>Sub Kegiatan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i>   |  |            |  |
|    | <i>Sub Kegiatan Pengadaan<br/>Pakaian Dinas Beserta<br/>Atribut Kelengkapannya</i>  |  |            |  |



|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  | <i>Sub Kegiatan enyediaan<br/>Komponen Instalasi<br/>Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor</i>        |  |  |  | <b>Belanja Makan Minum</b><br>   |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor</i>                               |  |  |  |   |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Peralatan Rumah Tangga</i>  |  |  |  |   |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Bahan Logistik Kantor</i>   |  |  |  |   |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Barang Cetak dan<br/>Penggandaan</i>                                    |  |  |  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk<br/>Kegiatan Kantor-Alat<br/>Tulis Kantor</b><br> |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Bahan Bacaan dan<br/>Peraturan Perundang-<br/>undangan</i>              |  |  |  |    |
|  | <i>Sub Kegiatan Dukungan<br/>Pelaksanaan Sistem<br/>Pemerintahan Berbasis<br/>Elektronik pada SKPD</i> |  |  |  |   |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>   |  |  |  |   |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>  |  |  |  |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> |  |  | <b>Belanja Cetak dan Penjilidan</b>  |
|  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>    |  |  |   |
|  | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   |  |  |  |



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No | Program/Sub Kegiatan                       | Rencana Aksi   | Keterangan  | Dokumentasi   |
|----|--|--|---|---|
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b> | RENCANA AKSI 1. Melakukan inventarisasi data baik rencana maupun realisasi belanja produk dalam negeri Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi (UMKK) dan produk impor (konstruksi dan non konstruksi) pada seluruh paket pekerjaan Tahun Anggaran 2022 dari belanja barang dan modal |   |   |
|    | Pembangunan Unit Air Baku                  |  | Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya : |  |
|    | Pembangunan Kanal Banjir                   | RENCANA AKSI 2. Untuk paket-paket yang belum tender, para PPK agar merencanakan penggunaan produk dalam negeri, UMKK atau produk yang diproduksi di dalam negeri. Dinyatakan dalam dokumen tender atau spesifikasi teknis serta dokumen kontraknya                               | - Pembangunan Reservoir Desa Kelubir Kab. Bulungan                      |   |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku     |  |   |   |



|          |  |  |   |   |
|----------|--|--|---|---|
|          | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | RENCANA AKSI 3. Untuk paket-paket yang sudah terkontrak, dilakukan addendum kontrak apabila ada rencana belanja produk impor. Produk impor harus diganti dengan produk dalam negeri jika memang tersedia produk sesuai kebutuhan spesifikasi di dalam negeri.<br><br>RENCANA AKSI 4. PPK melakukan pembaharuan data secara rutin pada aplikasi SIERA untuk paket pekerjaan penyedia. | Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya : |    |
|          | Operasi dan Pemeliharaan Sungai  |  | - Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Rawa Payau Tahap IV               |    |
|          | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa  |  | -   |   |
|          | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                        |  | Operasi dan Pemeliharaan Air Baku Biniang                               |   |
|          | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                             |  | Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya : |  |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                     |  |   |   |



|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
|                 | <p>- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</p> |  | <p>Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pematangan Jalan Lokal Sekunder R. 30 Tahap 2, usulan 1 sisi lebar 12 m</li><li>- Pembangunan Jalan Lokal Sekunder Kawasan Pusat Pemerintahan</li><li>- Penyiapan Badan Jalan Row 15, Kota Baru Mandiri Tanjung Selor</li></ul> |
| <p><b>3</b></p> | <p><b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b></p>  |  |    |



- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :

- Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan
- Pembangunan Gedung Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Nunukan
- Pembangunan Pagar Gedung Kantor BINDA Kalimantan Utara
- Pengecatan Lapangan Agathis dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Bulungan
- Rehabilitasi Halaman Parkir Kolam Renang KODIM 0903 Tanjung Selor
- Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Bulungan
- Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Multiyears)

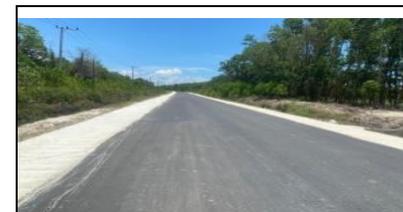




P3DN -

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara

- Pembangunan Gedung Kantor Diklat Provinsi Kalimantan Utara Tahap II
- Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VIII
- Pembangunan Workshop dan Laboratorium PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
- Pembangunan Struktur, Jalan Akses dan Parkir Kantor Gubernur Kalimantan Utara







|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan Box Culvert Ruas Simpang Sempayang - Simpang Batu Kajang</li><li>- Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Bawan - Lembudud (DAK Penugasan)</li><li>- Pembangunan Jalan Sekunder di Kawasan Pusat Pemerintahan</li><li>- Peningkatan Jalan Akses Menuju UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan</li><li>- Peningkatan Jalan Coastal Road Nunukan Ruas Jalan Mansapa - Pelabuhan Ferry Sei. Jepun - Sedadap - Lanal</li><li>- Simpang Kadir - Pelabuhan Tunon Taka</li><li>- Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tanah Kuning – Mangkupadi</li></ul> |  |
|--|--|---|--|



|  |                             |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|
|  | <p>- Rekonstruksi Jalan</p> |  | <p>Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekonstruksi Jalan Karang Agung - Klubir - Salimbatu</li><li>- Rekonstruksi Jalan Ruas Gunung Seriang - Long Peso</li><li>- Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan</li></ul> |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|



|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| <p>- Rehabilitasi Jalan</p> |  | <p>Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :-<br/>Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan- Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lingkar Pulau Nunukan : Binusan - Sei Banjar - Sei Mengkadu - Mansapa - Pelabuhan Ferry Sei Jepun- Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ring Road Malinau : Simpang 4 Pusat Pemerintahan - Tanjung Lapang - Lidung Keminci - Setulang - Punan Setarap- Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale - Achmad Yani Kabupaten Tana Tidung</p> |  |
|-----------------------------|--|---|--|

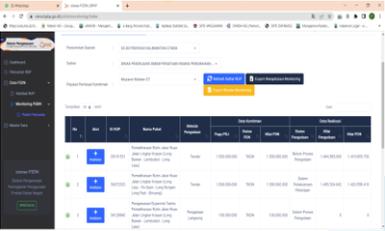


|  |                                     |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>- Pemeliharaan Berkala Jalan</p> |  | <p>Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekonstruksi Jalan Karang Agung - Klubir - Salimbatu</li><li>- Rekonstruksi Jalan Ruas Gunung Seriang - Long Peso</li><li>- Penanganan Longsor Ruas Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan</li></ul>                         |  |
|  | <p>- Pemeliharaan Rutin Jalan</p>   |  | <p>Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jalan Lingkar Krayan (Long Bawan - Lembudud - Long Layu)</li><li>- Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jalan Lingkar Krayan (Long Layu - Pa Upan - Long Rungan - Long Padi - Binuang)</li></ul> |  |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 5 | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                    | Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :<br>Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan di Nunukan, Malinau, dan Bulungan | Pembangunan/<br>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ambo Tuo RT 12 Malinau Kota<br> |
| 6 | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b> |   | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)<br>                |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p>- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman</p> |  | <p>Paket pekerjaan pada sub kegiatan ini yang mendukung P3DN diantaranya :Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan di Nunukan, Bulungan, Tarakan dan KTT</p>  |
|  |  |  | <p>Dokumentasi kegiatan sosialisasi kepada PPK terkait P3DN tahun 2022</p>  <p>Proses Input Realisasi TKDN pada aplikasi</p>  |



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

| No | Program/Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Keterangan   | Dokumentasi  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | <p>Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <p>Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga keuangan bukan bank</p> | <p>Rencana aksi melaksanakan koordinasi dan monitoring dengan bank daerah (BPD Kaltimtara) terkait pembayaran melalui SP2D online dan atkp pada bendahara pengeluaran</p> | <p>Telah dilaksanakan Sosialisai Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Nasional pada 16 dan 17 Juni 2022 di Tanjung Selor</p> <p>Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Kas Daerah pada 21 s/d 22 Juli di Kota Tarakan</p> |  |



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

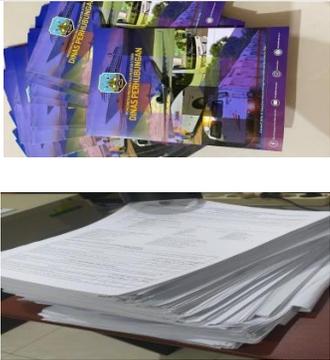
| No | Program/Sub Kegiatan                            | Rencana Aksi  | Keterangan  | Dokumentasi   |
|----|---|---|---|---|
| 1  | Pengadaan Mebel Sekolah                         | 1). Berbelanja dengan metode pengadaan langsung. 2). Memberdayakan pelaku usaha/ perajin lokal yang melaksanakan pekerjaan. | Bahan baku mebel berbahan kayu diambil, diolah, dan dikerjakan di Kalimantan Utara. Total ada 3 paket pekerjaan yang demikian dengan nilai pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 217,7 juta.   | <br>    |
| 2  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Berbelanja melalui e-katalog.   | Total ada 52 paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui e-katalog dengan estimasi nilai pekerjaan Rp 40 miliar. Produk yang tayang di e-katalog sudah terkonfirmasi memiliki TKDN di atas 25%. | <br> |



DINAS PERHUBUNGAN

| No | Program/Sub Kegiatan   | Rencana Aksi            | Keterangan | Dokumentasi  |
|----|--|-------------------------|------------|--|
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                         |            |  |
| a  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Makan Minum Kegiatan    | TKDN 100%  |   |
| b  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | ATK & Makan Minum Rapat | TKDN 100%  |  |



|   |   |                                |           |   |
|---|---|--------------------------------|-----------|---|
| c | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Cetak, Penggandaan, Penjilidan | TKDN 100% |  |
| d | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Pengadaan Genset               | TKDN 100% |  |
| e | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Materai                        | TKDN 100% |   |
| f | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                                | TKDN 100% |   |



|   |   |                           |           |  |
|---|---|---------------------------|-----------|--|
| g | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BBM, Pajak & Pemeliharaan | TKDN 100% |   |
| h | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Service Ac, PC, Printer   | TKDN 20%  |   |
| i | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                           | TKDN 100% |  |



|   |  |  |          |   |
|---|--|--|----------|---|
| 2 | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN LALU<br/>LINTAS DAN ANGKUTAN<br/>JALAN (LLAJ)</b> |  |          |   |
| a | Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Provinsi                            | Pengadaan ETLE (Electronic Traffic<br>Law Enforcement) | TKDN 20% | <br> |



|  |  |                                     |          |  |
|--|--|-------------------------------------|----------|--|
|  |  | Pengadaan Jembatan Timbang Portable | TKDN 10% | <br> |
|  |  | Pengadaan dan Pemasangan LPJU       | TKDN 20% |    |



|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 3 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>     |   |   |  |
| a | Pembangunan Pelabuhan Penumpang Regional | Penyusunan Survey Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Baru | Kegiatan Dibatalkan, dan anggaran digeser pada APBD Perubahan |  |
|   |  | Pekerjaan Agregat Area Parkir Pelabuhan   | TKDN 80%  |  |



P3DN –

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara

### BAB III PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyimpulkan sebagai berikut :

1. Melengkapi kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait P3DN diantaranya :
  - a. Kebijakan yang mendorong UMK dan Koperasi untuk memudahkan mendapatkan sertifikasi TKDN (*Supply*).
  - b. Kebijakan Pemerintah Daerah yang memberikan insentif/sanksi atas implementasi P3DN; dan
  - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) alur proses pendaftaran pada e-Katalog Lokal.
2. Progres realisasi pelaksanaan P3DN sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 adalah sebesar 57,77%.



P3DN -

Laporan P3DN Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara

**LAMPIRAN**  
**SK TIM**  
**PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK**  
**DALAM NEGERI (P3DN)**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2022**



**LAMPIRAN**  
**INPRES NO 22 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN**  
**PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK**  
**USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI**  
**DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN**  
**NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA**  
**PADA PELAKSANAAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**



SALINAN

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.738/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR  
188.44/K.619/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil review atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka perlu merubah Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.619/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.619/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.619/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.619/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.619/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, diubah sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.738/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR  
188.44/K.619/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

| <b>NO</b> | <b>JABATAN/INSTANSI</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|-----------|--|----------------------------|
| 1         | Gubernur Kalimantan Utara  | Pengarah                   |
| 2         | Wakil Gubernur Kalimantan Utara  | Penanggung Jawab           |
| 3         | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara  | Ketua                      |
| 4         | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara            | Wakil Ketua                |
| 5         | Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara            | Ketua Harian               |
| 6         | Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara        | Sekretaris                 |
| 7         | Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara | Anggota                    |
| 8         | Kepala Biro Perekonomian (PPKom) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                | Anggota                    |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 9  | Analisis Pengelolaan Keuangan<br>Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara   | Anggota Sekretariat |
| 10 | Analisis Kebijakan Ahli Madya (PPKom)<br>Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                          | Anggota             |
| 11 | Analisis Kebijakan Ahli Madya<br>Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                  | Anggota             |
| 12 | Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa (PPKom)<br>Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |
| 13 | Kepala Bagian Pengelolaan<br>Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                     | Anggota             |
| 14 | Kepala Bidang Pengembangan<br>Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |
| 15 | Sekretaris Dinas Perhubungan (PPKom) Provinsi Kalimantan Utara   | Anggota             |
| 16 | Analisis Perencanaan Anggaran<br>Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara   | Anggota             |
| 17 | Kepala Bidang Perencanaan Dan Sumber Daya Alam<br>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara | Anggota             |
| 18 | Analisis Barang Milik Negara<br>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara                   | Anggota             |
| 19 | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |
| 20 | Analisis Pengelolaan Keuangan (PPKom)<br>Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |
| 21 | Analisis Keuangan<br>Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 22 | Inspektur Pembantu Wilayah III<br>Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota |
| 23 | Pengadministrasi Keuangan<br>Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara   | Anggota |
| 24 | Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota |
| 25 | Analisis Pelayanan Publik (PPKom)<br>Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota |
| 26 | Analisis Data Dan Informasi<br>Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota |
| 27 | Kepala Bidang Sumber Daya Air<br>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara            | Anggota |
| 28 | Kepala Sub Bagian Perencanaan (PPKom)<br>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara    | Anggota |
| 29 | Analisis Data Dan Informasi<br>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara              | Anggota |
| 30 | Kepala Bidang Statistik<br>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara                               | Anggota |
| 31 | Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik (PPKom)<br>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara | Anggota |
| 32 | Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran<br>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara                | Anggota |
| 33 | Kepala Bidang Perencanaan Promosi Dan Kerjasama PM<br>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara      | Anggota |
| 34 | Analisis Kebijakan Ahli Muda (PPKom)<br>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara                    | Anggota |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 35 | Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara     | Anggota             |
| 36 | Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |
| 37 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda (PPKom)<br>Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara        | Anggota             |
| 38 | Analisis Barang Milik Negara<br>Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara                       | Anggota             |
| 39 | Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (PPKom) Provinsi Kalimantan Utara   | Anggota             |
| 40 | Analisis Kebijakan Barang Milik Daerah<br>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara                  | Anggota             |
| 41 | Kepala Wakil Ketua Bidang Perdagangan & Bulog<br>Kamar Dagang dan Industri   | Anggota             |
| 42 | Kepala Bidang Koperasi dan UKM<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara         | Anggota             |
| 43 | Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara  | Anggota             |
| 44 | Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara | Anggota             |
| 45 | Kepala Bidang Industri<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara                 | Anggota             |
| 46 | Kepala Sub Bagian Perencanaan<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara          | Anggota Sekretariat |
| 47 | Pengawas Koperasi Ahli Muda<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara            | Anggota Sekretariat |
| 48 | Analisis Perdagangan Ahli Muda<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara         | Anggota Sekretariat |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 49 | Penyuluh Perindustrian Ahli Muda<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara     | Anggota Sekretariat |
| 50 | Pengawas Perdagangan Ahli Muda<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara       | Anggota Sekretariat |
| 51 | Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara        | Anggota Sekretariat |
| 52 | Auditor Muda (PPKom)<br>Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara   | Anggota Sekretariat |
| 53 | Analisis Perencanaan<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara                 | Anggota Sekretariat |
| 54 | Analisis Data dan Informasi<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara          | Anggota Sekretariat |
| 55 | Penyusun Rencana Jaringan Distribusi<br>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara | Anggota Sekretariat |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALJWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN  
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA  
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Kepala Staf Kepresidenan;  
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
9. Para Gubernur; dan  
10. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :  
PERTAMA 1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

2. Merencanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.

10. Mengumumkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk:
  - a. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang kemaritiman dan investasi dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang perekonomian dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain, namun tidak terbatas pada:
    - 1) mendorong gubernur dan bupati/wali kota memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
    - 2) mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
    - 3) memasukkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 3) memasukkan indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD); dan
  - b. memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.
4. Menteri Keuangan untuk:
  - a. memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang telah memenuhi ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuktikan oleh lembaga yang berwenang serta pertimbangan lain dalam pemberian insentif;
  - b. melakukan pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. mengembangkan sistem dan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai pemungut pajak; dan
  - d. mendukung dan mempercepat sistem pembayaran *procure to pay* (P2P) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk *e-purchasing* terutama untuk paket usaha kecil atau barang produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk:
  - a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi termasuk belanja yang dialokasikan melalui transfer daerah;
  - b. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh satuan pendidikan, terutama oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
  - c. meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk menjadi produk substitusi impor.
6. Menteri Kesehatan untuk:
- a. menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan) produk dalam negeri; dan
  - c. memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
7. Menteri Perindustrian untuk:
- a. membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan data perencanaan, pengalokasian, dan realisasi belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN produk dalam negeri yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. mengelola dan mengembangkan *database* produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN;
  - d. mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam Katalog Elektronik;
  - e. mengidentifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri serta menyelenggarakan *business matching* secara berkala antara penyedia dan pengguna produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan tindak lanjut;
  - f. mempersiapkan *offset agreement* untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri; dan
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada instansi Pemerintah.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:
- a. mengembangkan instrumen analisis atau *modeling* berbasis *big data* dan *artificial intelligence* untuk mendukung perencanaan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dalam negeri dan sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. mengoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan lintas sektor dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi *pilot project* Satu Data Indonesia (SDI).
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk:
- a. menetapkan kebijakan penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan terkait penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. membangun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. membangun dan mengoordinasikan integrasi proses bisnis untuk menghasilkan data dan informasi terkait penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- a. memerintahkan Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun *roadmap* penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. mewajibkan Badan Usaha Milik Negara untuk mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai produsen barang/jasa substitusi impor;
  - d. menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk membantu pengembangan aplikasi dan infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. mempercepat pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) di seluruh Badan Usaha Milik Negara; dan
  - f. berkoordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung kesiapan pembiayaan bagi Pelaku Usaha sebagai modal usaha dalam memproduksi permintaan produk dalam negeri belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:
- a. melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan;
  - b. memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - c. memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri yang saat ini belum cukup kapasitas produksinya dan/atau belum tersedia;
  - e. mempromosikan dan menyelenggarakan *business matching* antara Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai *supplier* dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pembeli untuk produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara berkala dan melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan *business matching*;
  - f. memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - g. mengembangkan dan mengelola katalog Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dapat ditransaksikan secara elektronik; dan
  - h. menyusun kebijakan dan regulasi sebagai upaya mendorong produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok global.

12. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

12. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:
  - a. mendorong percepatan investasi di Indonesia pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah;
  - b. memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan produk dalam negeri berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah; dan
  - c. mempercepat pengembangan Sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS) yang dapat mengklasifikasikan Pelaku Usaha dan mengintegrasikan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
13. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
  - a. melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - b. memperkuat infrastruktur telekomunikasi agar seluruh sistem terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

15. Jaksa Agung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

15. Jaksa Agung Republik Indonesia untuk:
  - a. melakukan pendampingan hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - b. memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan langkah hukum yang diperlukan terhadap pelanggaran Pelaku Usaha atas ketentuan mengenai produk dalam negeri.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
  - a. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membutuhkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung program penggunaan produk dalam negeri; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung kegiatan pengawasan program penggunaan produk dalam negeri.
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk:
  - a. meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri;
  - b. memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), *e-Tendering*, *e-Purchasing*, non *e-Tendering* dan non *e-Purchasing*, serta e-Kontrak untuk dapat di ekstrak lebih awal sebagai mekanisme *Early Warning System*/pemantauan;
  - c. melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. memperbanyak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring;
  - e. mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - f. memasukkan menu *input* 'Produk Dalam Negeri' pada E-Kontrak, untuk mengidentifikasi besaran nilai produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
  - g. memberikan akses basis data kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait yang membutuhkan untuk evaluasi dan monitoring, analisis *demand*, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit.
18. Kepala Badan Pusat Statistik untuk mengelola *big data* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
19. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk meningkatkan hasil riset dalam pengembangan produk dalam negeri untuk menjadi produk substitusi impor.
20. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan belanja produk dalam negeri termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.
21. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah dan Kepala Badan Pusat Statistik untuk menyediakan *database* jumlah, bidang usaha, dan sebaran Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

22. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

22. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk:
- a. melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan korespondensi kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - b. melakukan integrasi data dan/atau interkoneksi sistem yang mendukung kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, SPSE/SIKaP/Katalog Elektronik, Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik *Online*, dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
23. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar menetapkan pedoman sebagai acuan bagi *policy space* untuk penetapan TKDN dalam negosiasi dengan negara mitra dalam proses perundingan perjanjian perdagangan internasional.
24. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar menetapkan pedoman penetapan TKDN sebagai acuan bagi *policy space* dalam rangka kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman hibah luar negeri.
25. Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

25. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pendampingan untuk memastikan kepatuhan belanja produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
26. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi pengawasan terintegrasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
27. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk:
  - a. menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
  - b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan
  - c. memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

KETIGA : Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



  
Silvana Djaman